

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasca reformasi tahun 1998, partai politik memiliki kedudukan yang semakin penting dalam sistem politik Indonesia. Dari sisi kaderisasi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintahan (*eksekutif*), perwakilan (*legislatif*), dan peradilan (*yudikatif*) baik di tingkat pusat maupun daerah mekanismenya harus melalui partai politik.

Kaderisasi bagi partai politik merupakan upaya yang penting, karena setiap partai harus mempersiapkan dan membina para kader untuk menjadi anggota partai yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kecakapan berorganisasi yang optimal. Kaderisasi dilaksanakan dalam suatu sistem yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kaderisasi.

Praktek kaderisasi partai politik di Indonesia masih jauh dari harapan, karena kegagalan kaderisasi tersebut banyak partai politik melahirkan kader-kader partai yang instan. Kader partai yang instan inilah membuat wajah hitam parlemen di DPR dan di pemerintahan. Matinya kaderisasi di tubuh partai politik ini karena partai tidak mempunyai ideologi dan visi yang jelas. Maka dari itu sangat sulit untuk merekrut anggota. Dalam perekrutan perlu pesan yang dapat menarik perhatian orang dan dapat meyakinkan mereka untuk bergabung dalam partai. Tanpa dasar ideologi yang kuat pesan yang meyakinkan sangat sulit dikembangkan.

Partai politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.

Secara garis besar peran dan fungsi partai politik dapat di bedakan menjadi dua. Pertama, peran dan tugas internal organisasi. Dalam hal ini organisasi partai politik memainkan peran penting dalam pembinaan, edukasi, pembekalan, kaderisasi, dan melanggengkan ideologi politik yang menjadi latar belakang pendirian partai politik. Kedua, partai politik juga mengemban tugas yang lebih bersifat eksternal organisasi, di sini peran dan fungsi partai politik terkait dengan masyarakat luas, bangsa dan negara. Kehadiran partai politik juga memiliki tanggung jawab konstitusional, moral, dan etika untuk membawa kondisi dan situasi masyarakat menjadi lebih baik.

Akan tetapi, banyak partai politik yang bisa menciptakan kemampuan kompetitifnya, namun sedikit yang dapat menjaga daya kompetitifnya sehingga berkesinambungan atau bertahan lama. Kesalahan utamanya karena mereka tidak mampu memelihara dan menghasilkan keunggulan kompetitif serta mewariskannya kepada generasi selanjutnya, atau yang bisa disebut dengan kaderisasi.

Kaderisasi adalah proses pendidikan jangka panjang untuk menanamkan nilai-nilai tertentu kepada seorang kader. Kader adalah anggota, penerus organisasi. Kader harus meyakini nilai-nilai bersama sebagai pembentuk watak dan karakter organisasi. Organisasi, apapun itu mutlak mensyaratkan kaderisasi. Terlebih lagi bagi partai politik. Kaderisasi merupakan hal yang fundamental untuk mempertahankan eksistensi sebuah partai politik. Kaderisasi ini bertujuan untuk menciptakan sebuah regenerasi.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak partai-partai besar yang dianggap

gagal dalam kaderisasinya. Salah satu indikasinya adalah adanya kader partai yang meloncat ke partai yang lainnya atau mengundurkan diri dari keanggotaan partai. Realita telah menunjukkan beberapa kadernya telah mengundurkan diri dan terjatuh beberapa kasus.

Menurut Firmanzah (2008:70), menyebutkan bahwa:

“Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakilinya. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya. Perlu suatu proses pendidikan – baik formal maupun nonformal – yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Selain melakukan proses rekrutmen, di dalam tubuh parpol perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya”.

Lebih lanjut dikatakan Firmanzah, bahwa sistem kaderisasi perlu disertai dengan sistem transparansi yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transparan dalam tubuh organisasi partai politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem persaingan yang sehat dan transparan itu. Karena, dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi akan dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas tinggi (2008:71).

Di Indonesia telah dibentuk beberapa undang-undang partai politik, yang terbaru adalah Undang-undang No. 2 Tahun 2011 yang memuat mulai dari persyaratan pembentukan partai politik di Indonesia, tujuan dan fungsi partai politik, hak dan kewajiban partai politik, dan berbagai aturan lain yang berhubungan dengan sistem kepartaian di Indonesia. Dengan adanya undang-undang kepartaian tersebut, tentu lebih menegaskan secara

prosedural mengenai segala hal terkait bagaimana seharusnya partai politik itu sendiri.

Dalam UU No.2 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (1) tentang Partai Politik menyatakan bahwa kedaulatan partai politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(AD/ART). Sayangnya, ini banyak tidak diterjemahkan secara jelas dalam AD/ART partai, sehingga muncul kelonggaran aturan main yang sangat terbuka untuk dipelintir atau memicu berbagai interpretasi yang saling bertentangan. Di sisi lain, AD/ART juga tidak cukup menciptakan instrumen yang jelas, detail, dan lebih terbuka bagi keterlibatan yang signifikan dari para anggota partai. Ini terjadi karena tidak ada standar yang jelas dalam aturan-aturan internal partai dalam mengelola momen-momen ini. Artinya, perseteruan seringkali muncul karena perbedaan dalam memahami dan menginterpretasikan AD dan ART partai.

AD/ART perlu disusun untuk memberikan panduan batasan yang lebih jelas dalam menunjukkan kualifikasi yang jelas bagi anggota baru, pengurus, dan calon yang akan dipromosikan dalam jabatan publik atau politik oleh partai. Ini penting untuk menghindari berbagai penafsiran yang beragam terhadap konstitusi partai, yang ujung-ujungnya kerap kali menjadi milik pengurus atau faksi-faksi terkuat dalam partai. Dengan kata lain, diperlukan AD/ART yang lebih mampu menjawab problem sistemik bagi agenda demokratisasi internal partai.

Pengaturan lain yang juga butuh dipastikan dalam regulasi adalah memastikan kontinuitas rekrutmen anggota baru dan pergantian kepengurusan partai. Kaderisasi anggota baru tidak bisa dilakukan secara sporadis apalagi semata untuk menghadapi momen pemilu.

Menurut Cheppy Haricahyono,

“Berbicara partai politik setidaknya menyangkut tiga pihak. Pertama, massa anggota partai yang jumlahnya jauh lebih besar dibanding yang lain, yang kebanyakan menjadi anggota partai hanya secara normatif, dan tingkat kesetiaan terhadap partai tidak benar-benar mengakar. Kedua, *the professional workers* yang menempati posisi pengurus dalam organisasi partai. Dan yang ketiga, sekelompok elite partai yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam menentukan garis kebijaksanaan partai. Pada umumnya, masing-masing partai politik memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Karakteristik yang dimaksud adalah keanggotaan, organisasi dan administrasi, arah dan tujuan, serta berbagai sumber lain yang menyangkut dana, kecakapan, kekuatan pemilih, calon-calon yang kharismatis, dan lain sebagainya (Cheppy Haricahyono, 1991: 191).”

Melalui fungsi kaderisasi, partai politik bertanggungjawab dalam melaksanakan pendidikan politik melalui kaderisasi partai. Caranya bisa melalui diskusi, seminar-seminar, hingga mengikuti suatu pemilihan untuk menjabat jabatan tertentu. Dengan ini partai juga dapat mencegah bentuk kepemimpinan negara yang oligarkis, karena partai menjamin adanya partisipasi politik dari setiap elemen masyarakat untuk menduduki kepemimpinan politik berdasarkan kriteria dan bakat tertentu yang dimiliki oleh setiap individu.

Karena ketika kaderisasi partai politik gagal, maka yang akan terjadi adalah nilai-nilai partai politik tidak sampai kepada generasi berikutnya. Generasi tua akan selalu memikul beban sejarah sendiri, selamanya. Terjadinya rangkap jabatan, sulit suksesi (pergantian) pengurus karena tidak ada yang bersedia mengabdikan diri bagi organisasi sosial, anggota yang merasa tertipu karena kenyataan tidak semanis yang dijanjikan kemudian meninggalkan organisasi, kegiatan atau program kerja tidak berjalan, eksistensi di masyarakat menurun, dan akhirnya apabila tidak ada perbaikan, organisasi tersebut akan dilupakan dan tidak menutup kemungkinan bubar.

Logikanya sederhana, dalam sebuah *political market*, kader merupakan salah satu *product* yang menentukan daya jual partai di publik. Makin baik pola kaderisasi dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu *product* yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Makin baik mutu *product* yang diajukan, maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Jadi kinerja sebuah partai politik, sangat ditentukan oleh kualitas dan sepak terjang kader-kadernya.

Elektabilitas partai politik sangat mempengaruhi masyarakat, Istilah-istilah yang dipergunakan dalam pemilihan umum banyak yang masih sulit dicerna rakyat biasa. Apakah sekedar untuk popularitas dengan sering tampil, atau untuk meningkatkan elektabilitas. Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang memiliki popularitas dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi.

Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Penentu suatu pilihan, popularitas atau elektabilitas. Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat. Ada orang baik, yang memiliki kinerja tinggi dalam bidang yang ada hubungannya dengan jabatan publik yang ingin dicapai, tapi karena tidak ada yang memperkenalkan menjadi tidak elektabel. Sebaliknya, orang yang berprestasi tinggi dalam bidang yang tidak ada hubungannya dengan jabatan publik, boleh jadi mempunyai elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

Dalam masyarakat, sering diartikan, orang yang populer dianggap mempunyai elektabilitas yang tinggi. Sebaliknya, seorang yang mempunyai elektabilitas tinggi adalah orang yang populer. Popularitas dan elektabilitas

tidak selalu berjalan seiring. Orang yang memiliki elektabilitas tinggi adalah orang yang dikenal baik secara meluas dalam masyarakat.

Dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh saudara Wengki Saputra pada tahun 2012 dengan judul pola rekrutmen partai politik dalam menetapkan caleg pada pemilu legislatif, dengan hasil penelitian ini berdasarkan 3 indikator pola rekrutmen partai politik yaitu: pertama, penyediaan rekrutmen politik terhadap Caleg, partai politik menyediakan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencalonkan diri. Kedua, Kriteria rekrutmen politik pemimpin, syarat/ kriteria Caleg oleh Partai partai politik. Ada beberapa kriteria yang tidak terpenuhi oleh Caleg, seperti pendidikan masih banyak yang belum S1, popularitas, akseptabilitas dan kapabilitas belum terpenuhi. Ketiga, kontrol rekrutmen politik dilakukan pada bakal calon Legislatif dari internal dan eksternal partai. Ada beberapa kendala yang dihadapi partai politik dalam merekrut Caleg, antara lain banyak Calon yang meminta nomor urut kecil, meminta Dapil, dan *black campign*.

Maka diasumsikan bahwa setiap partai politik memiliki dan menerapkan pola kaderisasi yang berbeda-beda yang turut menentukan kualitas para kadernya terhadap elektabilitas partai politiknya. Apabila masing-masing partai memahami dan menyadari bahwa tugas, peran, dan fungsi mereka sangat mempengaruhi elektabilitas partainya dengan adanya kaderisasi yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **PERAN KADERISASI DALAM MENINGKATKAN ELEKTABILITAS PARTAI POLITIK (Studi Kasus Terhadap DPCPartai Gerindra Kota Bandung)**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Proses pengkaderan di partai politik yang belum efektif.
2. Hasil pengkaderan partai politik belum berkualitas dan optimal.
3. Pendayagunaan kaderisasi belum melahirkan politisi yang berkualitas.

C. Perumusan dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan latar belakang secara umum permasalahan yang akan diteliti melalui penelitian ini adalah “Bagaimana proses dan hasil kaderisasi dalam partai politik terhadap elektabilitas partai politik oleh masyarakat?”

D. Batasan Masalah

Atas dasar perumusan masalah tersebut penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses kaderisasi yang dijalankan DPC Partai Gerindra Kota Bandung?
2. Apa yang menjadi kendala kaderisasi DPC Partai Gerindra Kota Bandung?
3. Bagaimana upaya DPC Partai Gerindra Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas kadernya agar sesuai dengan harapan masyarakat?
4. Bagaimana kriteria keberhasilan dari pola Kaderisasi yang diterapkan di DPC Kota Bandung untuk meningkatkan Elektabilitas Partai Gerindra?

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran secara lengkap mengenai Peran kaderisasi DPC Kota Bandung dalam meningkatkan Elektabilitas Partai Gerindra

2. Tujuan Khusus

Yang menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui data tentang:

1. Proses kaderisasi yang dijalankan DPC Partai Gerindra Kota Bandung.
2. Kendala kaderisasi DPC Partai Gerindra Kota Bandung.
3. Upaya DPC Partai Gerindra Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas kadernya agar sesuai dengan harapan masyarakat.
4. Kriteria keberhasilan dari pola Kaderisasi yang diterapkan di DPC Kota Bandung untuk meningkatkan Elektabilitas Partai Gerindra.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam materi tentang partai politik khususnya pola sistem kaderisasi partai politik terhadap elektabilitas partai politik. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan dan sebagai latihan dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
2. Penelitian ini dilakukan sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan di Universitas Pasundan Bandung.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu sarana penerapan serta pengembangan teori yang telah didapat selama proses perkuliahan.

c. Bagi DPC Partai Gerindra Kota Bandung

Sebagai pembuktian nyata penerapan demokrasi sekaligus bentuk transparansi Partai Gerindra kepada masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan tambahan bagi masyarakat sekaligus sebagai pendidikan politik baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dalam kehidupan sehari-hari.

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

“Menurut Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa, “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting”.

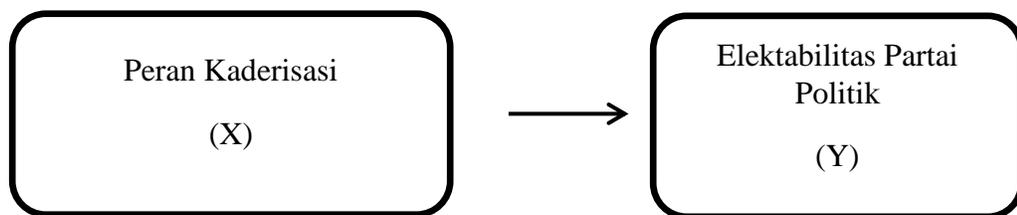
Kaderisasi adalah proses pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh dalam partai politik kaderisasi sangat penting karena setiap partai harus mempersiapkan dan membina para kader untuk menjadi anggota partai yang memiliki jiwa kepemimpinan dan kecakapan berorganisasi yang optimal. Kaderisasi dilaksanakan dalam suatu sistem yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kaderisasi.

Untuk meningkatkan elektabilitas partai politik maka sangat penting peran kaderisasi dalam partai agar setiap kader-kader politik memiliki jiwa kepemimpinan yang berkualitas untuk membangun Bangsa dan Negara.

Penelitian peran kaderisasi untuk meningkatkan Elektabilitas partai politik belum pernah dilakukan sebelumnya maka dari itu peneliti mengambil permasalahan atau judul tentang peran kaderisasi dalam meningkatkan Elektabilitas partai politik sebagai wawasan pola kaderisasi

partai politik yang efektif dan optimal agar sesuai dengan harapan masyarakat dan sebagai wawasan untuk meningkatkan elektabilitas partai politik di mata masyarakat.

Untuk memperjelas kedua variabel tersebut di bawah ini digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:



1. Asumsi

Dalam hal ini peneliti harus dapat memberikan sederetan asumsi yang kuat tentang kedudukan permasalahan yang sedang diteliti. Asumsi yang harus diberikan tersebut, diberi nama asumsi dasar atau anggapan dasar. Anggapan dasar ini merupakan landasan teori di dalam pelaporan hasil penelitian nanti.

Anggapan dasar atau postulat merupakan sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik, dimana setiap penyelidik dapat merumuskan postulat yang berbeda.

Untuk meningkatkan elektabilitas partai politik perlu adanya kader kader yang berkualitas karena kader merupakan salah satu "*product*" yang menentukan daya jual partai di publik. Makin baik pola kaderisasi dalam tubuh sebuah partai, maka makin baik pula mutu

"*product*" yang akan dihasilkan dan ditawarkan ke publik. Makin baik mutu *product* yang diajukan, maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan dipilih merupakan kader-kader partai terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Jadi kinerja sebuah partai politik, sangat ditentukan oleh kualitas dan sepak terjang kader-kadernya.

H. Devinisi Oprasional

Definisi Operasional adalah definisi menunjukkan spesifikasi atau ciri-ciri spesifik (indikator-indikator) yang lebih substantif dari sesuatu konsep. Dengan kata lain definisi operasional adalah batasan yang dibuat berdasarkan karakteristik, ciri-ciri spesifik dari sesuatu konsep yang dikemukakan secara lebih terurai, sehingga lebih jelas menunjukkan makna dari konsep tersebut.

Untuk menghindari salah penafsiran dan pengertian terhadap beberapa istilah yang ada dalam permasalahan ini, maka penulis memberikan penjelasan yang dirumuskan ke dalam definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran

Menurut Soekanto (2009:212-213),

“Peran adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.”

2. Kaderisasi

Kaderisasi adalah proses pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai tertentu, hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh.

(<https://annisalidramaribeth.wordpress.com/2011/02/26/kaderisasi/>:07/06/2016: Jam 22.20 WIB.)

3. Partai Politik

Menurut UU NO. 2 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1,

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang.”

4. Elektabilitas

Elektabilitas adalah tingkat keterpilihan yang disesuaikan dengan kriteria pilihan. Elektabilitas bisa diterapkan kepada barang, jasa maupun orang, badan atau partai. Elektabilitas sering dibicarakan menjelang pemilihan umum. Elektabilitas partai politik berarti tingkat keterpilihan partai politik di publik. Elektabilitas partai tinggi berarti partai tersebut memiliki daya pilih yang tinggi. Untuk meningkatkan elektabilitas maka objek elektabilitas harus memenuhi kriteria keterpilihan dan juga populer.

(<http://obrolanpolitik.blogspot.co.id/2013/03/beda-pengertian-elektabilitas-dan.html>:07/06/2016: Jam 22:32.)

I. Struktur Organisasi Skripsi

LEMBAR PENGESAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

PRNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

KATA PENGANTAR

UCAPAN TERIMAKASIH

ABSTRAK

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Identifikasi Masalah
- C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan
- D. Batasan Masalah
- E. Tujuan Penelitian
- F. Manfaat Penelitian
- G. Kerangka Pemikiran
- H. Definisi Operasional
- I. Struktur Organisasi Skripsi

BAB II KAJIAN TEORITIS

- A. Kajian Teori
 - 1.1 Tinjauan Tentang Kaderisasi
 - 1.2 Tinjauan Tentang Partai Politik
 - 1.3 Tinjauan Tentang Elektabilitas

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Metode Penelitian
- B. Desain Penelitian
- C. Partisipan dan Tempat Penelitian
- D. Pengumpulan Data

E. Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil dan Temuan Penelitian

B. Pembahasan Penelitian

BAB V SIMPULAN dan SARAN

A. Simpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

-